



KONSEP KAPAL INDUK STATIS UNTUK MENGANTISIPASI KONFLIK MARITIM DI LAUT CHINA SELATAN

(Static Master Ship Concept To Anticipate Territorial Conflict
In The South China Sea)

Budi Darmawan Amran, Suhirwan , Rudi Sutanto
Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan
Email: rudi.sutanto071@gmail.com

Abstrak, Konflik wilayah maritim di Laut China Selatan (LCS) berlatar belakang pada sebuah klaim sepihak Tiongkok yang menganggap sebagian besar kawasan itu sebagai bagian teritorialnya berdasar peta negara Tiongkok tahun 1947. Berbagai upaya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi kepemilikannya dengan mengambil sikap ofensif dan agresif. Selain melakukan patroli wilayah menggunakan unsur *Coast guard*, Tiongkok juga membangun pangkalan militer dan secara aktif melakukan berbagai latihan menggunakan armadanya di LCS. Terhadap Indonesia, klaim ini bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di wilayah Natuna. Terkait persinggungan itu, kapal-kapal patroli Tiongkok, secara aktif senantiasa melakukan penjagaan hingga pengawalan pada kapal berbendera mereka yang melakukan pelanggaran wilayah ZEEI dan kerap bersikap represif terhadap unsur patroli milik Bakamla dan TNI AL. Menghadapi kondisi ini, perlu disusun sebuah langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan meluasnya konflik yang selama ini terjadi apabila berkembang menjadi konflik militer. Pulau Natuna Besar, adalah pulau terdekat terluas dari kawasan ZEEI yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok. Pulau ini memiliki infrastruktur untuk menjadi garda kekuatan terdepan Indonesia dalam mengantisipasi kemungkinan di atas. Untuk itu, peneliti melakukan sebuah penelitian bersifat kualitatif terhadap Pulau Natuna Besar terkait kapasitasnya untuk menjadi sebuah Kapal Induk Statis yang memiliki kemampuan *surveillance* mumpuni, kekuatan penyerang dan pelindung, serta kekuatan pertahanan pantai strategis demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kata Kunci: Klaim Sepihak Tiongkok di LCS, Natuna Besar Sebagai Kapal Induk Statis, Keutuhan NKRI.

Abstract, *The maritime conflict in the South China Sea (LCS) has a background in a unilateral claim by China which considers most of the area as part of the territory based on the 1947 Chinese state map. Various attempts have been made to show the existence of their ownership*



by taking an offensive and aggressive attitude. In addition to conducting territorial patrols using elements of the Coast Guard, China is also building military bases and actively conducting various exercises using its fleet in the South China Sea. Against Indonesia, this claim intersects with the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) in the Natuna region. Regarding this contact, Chinese patrol ships actively guarded and escorted their flagged ships that violated the ZEEI area and often acted repressively towards patrol elements belonging to Bakamla and the Indonesian Navy. Facing this condition, it is necessary to formulate a strategic step to deal with the possibility of escalating the conflict that has occurred so far if it develops into a military conflict. Natuna Besar Island is the largest and closest island to the ZEEI area that intersects with China's claims. This island has the infrastructure to become Indonesia's leading force in anticipating the above possibilities. For this reason, researchers conducted a qualitative study of Natuna Besar Island regarding its capacity to become a Static Aircraft Carrier that has qualified surveillance capabilities, attack and protective forces, as well as strategic coastal defense forces to maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

Keywords: *China's Claims in the SCS, Natuna Besar as a Static Aircraft Carrier, the Integrity of NKRI.*

1. Pendahuluan

UNCLOS 1982 adalah aturan fundamental dalam mengatasi permasalahan batas wilayah antar negara di perairan. Ditandatangani oleh 160 negara, termasuk di dalamnya Indonesia dan seluruh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Mengacu kepadanya, perundingan bi/tri-lateral antar negara Kawasan Asia Tenggara menghasilkan solusi terbaik bagi kedaulatan masing-masing negara di kawasan. Akan tetapi adanya klaim sepihak dari Tiongkok (sebuah negara yang wilayahnya di luar Kawasan Asia Tenggara) atas sebagian besar perairan Laut China Selatan (LCS), menyebabkan munculnya konflik kewilayahan di sana.

Sekarangnya 5 negara Asia Tenggara terkena imbas klaim ini, termasuk Indonesia. Tiongkok, menganggap sebagian LCS merupakan bagian dari *Nine Dash Line* (NDL) mereka (Hasugian,2012). NDL sendiri adalah garis yang melingkupi wilayah seluas sekitar 2 juta km² di LCS yang oleh Tiongkok diakui sebagai area penangkapan ikan tradisional nelayan mereka (*Traditional Fishing Ground*). NDL membentang dari daratan Tiongkok sejauh 2.000 km hingga menjangkau wilayah laut milik Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Indonesia. Bagi Indonesia, klaim



Tiongkok berdampak pada hilangnya perairan seluas lebih kurang 83.000 km² atau 30 % dari luas laut Indonesia di wilayah Natuna bagian utara, pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) apabila Tiongkok memilih langkah progresif untuk memilikinya (Irawan,2022).

Pulau Natuna Besar (atau kadang disebut dengan nama Pulau Bunguran Besar) berada pada koordinat 4°0' Utara 108°15' Timur, merupakan pulau terbesar di wilayah Natuna. Pulau ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna, luasnya 1.605 km² dengan infrastruktur yang cukup memadai hingga memiliki bandara dan dermaga. Pulau ini, berjarak sekitar 130 NM (Nautical Mile) dari area yang di klaim sepihak oleh Tiongkok. Nautical Mile sendiri adalah adalah satuan panjang yang digunakan di seluruh dunia untuk mengukur jarak satu titik dengan titik lain di laut. 1 NM setara dengan 1,825 km (Fatubun, 2015). Apabila terjadi kejadian khusus di area yang di klaim oleh Tiongkok, maka unsur KRI akan mampu menjangkaunya dalam waktu kurang dari 12 jam.

Sebagai salah satu pulau besar yang berada di dekat batas wilayah teritorial laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara tradisional TNI melakukan gelar kekuatannya di Pulau Natuna Besar. Dalam rangka mengantisipasi berkembangannya konflik kewilayahan yang saat ini terjadi di LCS, perlu dilakukan penelitian terkait upaya peningkatan unsur TNI di Pulau Natuna Besar agar dapat menjadikan pulau ini memiliki kemampuan *surveillance* mumpuni, kekuatan penyerang dan pelindung, serta kekuatan pertahanan pantai strategis demi menjaga keutuhan wilayah NKRI (Legionosuko,2021).

2. Dasar Teori

Konsep pertahanan Negara Indonesia dirumuskan menggunakan Teori Lykke Model dengan tiga esensi dasar yaitu *means*, *ways* dan *ends*. *Means*-cara terkait aspek apa yang dimiliki. *Ways*-jalan adalah bagaimana cara memanfaatkan apa yang dimiliki. *Ends*-akhir/tujuan merupakan muara yang diharapkan (Lykke 1989). Makna konsep pertahanan Negara Indonesia menurut lykke adalah bagaimana



memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki dengan menggunakan metode yang terbaik guna mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Command of the sea yaitu *Sea control and sea denial* (Pengendalian laut dan penyangkalan laut) oleh AT Mahan, yang secara beragam didefinisikan sebagai kendali komunikasi maritim atau, lebih luas lagi, sebagai kebebasan untuk menggunakan laut dan untuk menyangkal penggunaan itu untuk musuh, sering digambarkan sebagai sesuatu yang mendekati 'cawan suci' perang angkatan laut. Philip Coulomb, misalnya, dengan berani menyatakan bahwa, tujuan utama perang angkatan laut adalah menguasai laut, sementara Cyprian Bridge menggambarkan kepemilikannya sebagai 'objek utama perang angkatan laut. Baik Mahan maupun Corbett mengakui pentingnya konsep ini.

Saat ini, angkatan laut dan para ahli strategi maritim pada umumnya setuju bahwa *command of the sea*, dalam arti absolut, sama tidak realistisnya. Penekanannya justru pada pengendalian laut, yang cenderung didefinisikan dan diartikulasikan dengan cara yang mirip dengan pendekatan Corbett. Corbett berpendapat bahwa *command* biasanya terbatas dalam hal waktu, derajat dan lokasi, memilah konsep menjadi perintah umum atau lokal dan sementara atau permanen. Ekspresi yang paling lengkap, perintah umum dan permanen, hampir tidak bisa dicapai kecuali dengan pemusnahan musuh secara praktis.

Teori Strategi Pertahanan dan Penangkalan (lazimnya untuk era saat ini lebih kepada pengendalian laut), merupakan teori dasar yang menjadi titik tolak penelitian. Hal ini dikarenakan peta konflik yang terjadi di Laut China Selatan bersifat kompleks, dan Indonesia selaku penganut pertahanan **defensif aktif** harus menentukan strategi pertahanan terbaik menghadapinya dan sebagai negara kepulauan, harus melakukan perlindungan pada kedaulatannya di laut. Upaya penggelaran pertahanan militer di titik strategis diharapkan mampu menimbulkan efek gentar dan efek penangkalan terhadap kemungkinan meluasnya konflik terbuka di Laut Cina Selatan.

Perang dapat dicegah apabila kekuatan *defense* dapat mengungguli dominansi *offense* (Glaser & Kauffman, 1998, hal. 45). Teori ini berangkat dari konsep *security*



dilemma milik Robert Jervis (Jervis 1978, hal. 172), bahwa *security dilemma* dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara negara dimana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan negara lainnya. Prediksi dasarnya adalah apabila *offense* mendominasi maka *security dilemma* akan meningkat, dan akan menyertainya adalah perlombaan senjata, dan akhirnya dapat mencetus perang.

Agar perang tidak tercetus, dengan pola pertahanan Indonesia yang bersifat aktif defensif, *defense* harus lebih baik daripada *offense*. Pagelaran Militer yang di Pulau Natuna Besar harus memiliki cukup kekuatan yang membuat negara manapun berpikir panjang untuk menghadapi kekuatan yang di gelar. Hal ini pun sesuai dengan doktrin penangkalan pada sebuah Kampanye Militer (Mabes TNI, 2020).

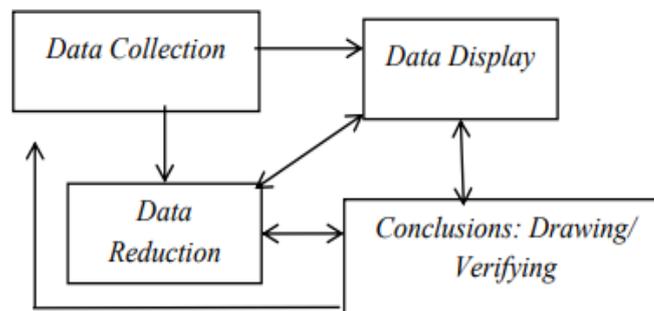
Penelitian terdahulu lain, diambil dari jurnal berjudul *Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis* oleh Marsetio. Dalam jurnal tersebut dituliskan tentang gelar kekuatan TNI di wilayah perbatasan sebagai upaya menghadapi Negara tetangga yang mempunyai kecenderungan melanggar kedaulatan Indonesia (Marsetio, 2013). Konsep membangun Pulau Natuna menjadi kapal induk statis. Dimana Pulau ini memiliki pertahanan pangkalan, kekuatan penyerangan, kemampuan perlindungan dan pertahanan pantai yang baik harus diimplementasi secara nyata. Kondisi riil saat ini, konsep di atas masih belum disertai strategi dan upaya pemecahan masalah teknis yang ada, sehingga masih sebatas wacana.

3. Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data

Metode yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif di mana analisis untuk mendapatkan solusi dan pemecahan persoalan dilaksanakan dengan studi kepustakaan, pengumpulan data, dan pengalaman penulis dalam penugasan. Selanjutnya, analisis dituangkan dalam jabaran masalah hingga penarikan kesimpulan secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata atau kerap disebut analisis deskriptif (Rifa'i, 2019).

Kegiatan pengambilan data sendiri dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan Teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik interaktif, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga tuntas. Langkah-langkah dalam analisis terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan (*conclusion drawing*) (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

Berikutnya, aktivitas analisis data memuat tampilan data. Secara umum, tampilan adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tampilan data ini khususnya membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian untuk dapat melakukan analisis lebih dalam. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif menafsirkan apa maksud dari data tersebut dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi (Miles et al., 2014).



Gambar 1. Teknik Analisis Data Menurut Miles, Sumber Sugiyono 2015

Selanjutnya, sebelum mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan uji kredibilitas (*credibility*). Dimana peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *member check* (Mekarisce, 2020).

4. Temuan di Lapangan

Kondisi gelar pertahanan militer di Pulau Natuna Besar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara melakukan pembangunan kekuatan di sana. Saat ini, di Natuna Besar telah tersedia 1 Batalyon Komposit. Batalyon ini memiliki kekuatan 1 Kompi yang merupakan ex Kompi C 138/TS yang terletak di Desa Sepempang. Pangkalan militer ini ditempatkan pula Sisdalops TNI Terpadu, Mess prajurit integratif, dibangun hanggar pesawat dan heli integratif, rumah sakit integratif (A Ziyadi,2016).

Dari segi kekuatan udara, terdapat hanggar skuadron *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), satuan rudal jarak sedang, perpanjangan *runway* dan perluasan *taxiway*, bunkers 5 pesawat tempur, serta Satuan Pertahanan Udara. Pembangunan pangkalan militer yang sedang berlangsung di Natuna juga disertai dengan pengembangan radar monitoring dan dermaga di beberapa desa.



Gambar 2 Alutsista Rai Arhanud Yon Komposit 1/Gardapati

Sumber, Dokumen Pasi Ops Yon Komposit 1/Gardapati. 2021



Gambar 3 Alutsista Ki Rai Armed Yon Komposit 1/Gardapati
Sumber, Dokumen Pasi Ops Yon Komposit 1/Gardapati. 2021



Gambar 4 Alutsista Ki Zipur Yon Komposit 1/Gardapati
Sumber, Dokumen Pasi Ops Yon Komposit 1/Gardapati. 2021



Gambar 5 Dermaga Posal Sabang Mawang

Sumber, Pangkalan TNI AL Ranai Tahun 2021

Aspek kekuatan dan kemampuan *surveillance*, kekuatan penyerang dan pelindung, serta kekuatan pertahanan diri Pulau Natuna akan sangat terkait dengan pembangunan dan atau pengadaan alat persenjataan (*weapons*) yang berupa rudal anti pesawat, rudal anti kapal, meriam artileri pertahanan udara, meriam artileri pertahanan pantai, tank ringan, kendaraan angkut personel lapis baja, senjata infanteri. Hal ini sudah berusaha dipenuhi oleh Mabes TNI selaku pemangku kebijakan teknis dan operasional.



Gambar 4.7 Lanud Raden Saadjad

Sumber: Dokumentasi As Ops Lanud Raden Saadjad. 2021



Untuk fasilitas penyimpanan/hanggar, keberadaan hanggar yang ada di Lanud Raden Sadjad Natuna baru pada tahap sebagai pangkalan aju bagi operasi pesawat tempur dengan fasilitas perbaikan dan perawatan terbatas.

Terkait dengan fasilitas yang mendukung pertahanan militer, maka fasilitas penyimpanan/hanggar telah dilaksanakan di Pangkalan Udara Raden Sadjad guna mendukung alutsista yang di-*deploy* di Natuna. Lanud Raden Sadjad minimal memiliki fasilitas hanggar portable, hanggar integritas dan hanggar UAV.

Kondisi yang sama, juga terhadap fasilitas labuh atau pangkalan sandar bagi unsur KRI. Masih bersifat dermaga perbekalan dengan tempat berlindung, perbaikan bersifat terbatas.

Kondisi gelar diatas sejauh ini menunjukkan belum cukup memiliki kapasitas untuk Pulau Natuna Besar berfungsi sebagai Kapal Induk Statis. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, pengakuan dari beberapa Komandan Satuan TNI di wilayah Natuna dikatakan bahwa: Pulau Natuna Besar sebagai kapal induk statis hingga saat ini masih sulit diwujudkan. Berdasarkan data di lapangan menyebutkan bahwa penangkapan radar di satuan radar 212 sudah terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional dan dapat tertampil di Popunas sebagai Kodal Panglima Kohanudnas dalam melaksanakan operasi Gakkumpamwilud. Namun hal tersebut belum cukup representative untuk mendukung interoperabilitas satuan TNI.

Selain itu, pola operasi yang dilakukan ketiga matra TNI di Natuna belum dilaksanakan secara terpadu, dan belum memanfaatkan segala potensi sumber daya lokal yang ada di sana. meskipun, saat ini telah terbentuk organisasi Satuan TNI Terintegrasi (STT). Namun satuan ini belum beroperasi.

5. Pembahasan

Berdasar temuan di atas, maka strategi terbaik adalah meningkatkan kapasitas pertahanan di Pulau Natuna Besar agar dapat menjadi Kapal Induk Statis dengan cara antara lain;



a. Menggunakan konsep Teori Strategi Lykke, yang intinya, untuk mencapai tujuan harus dimaksimalkan segala hal yang dimiliki berikut langkah yang harus diupaya terkait hal yang dimiliki. Indonesia harus mengambil langkah antisipatif yaitu melaksanakan Gelar TNI di Pulau besar terdekat area yang menjadi bagian konflik. Pulau Natuna Besar harus diperkuat oleh Indonesia secara militer. Secara sumber daya yang sudah ada disana saat ini, Pulau Natuna besar cukup mumpuni dijadikan sebagai pertahanan utama Indonesia di kawasan Natuna Utara.

Gelar alutsista TNI di wilayah Kepulauan idealnya menggunakan prinsip serta dasar-dasar Penggelaran. Adapun Prinsip-prinsip penggelaran terdiri dari **Massal** (mengcover berbagai ancaman yang datang dari dari segala arah), **Komposit** (mempunyai karakter yang saling melengkapi dalam menghadapi berbagai ancaman serangan), **Integrasi** (penyerangan sasaran dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan sesuai prosedur serta menghindarkan kemungkinan penembakan terhadap pasukan sendiri), **Mobilitas** (kemampuan untuk pindah gelar secara cepat ke posisi gelar baru, untuk menghindari deteksi dan usaha penghancuran musuh). Untuk itu, dasar-dasar Penggelaran yang harus diimplementasikan dalam bentuk **Kesatuan komando** (mengendalikan dan mengintegrasikan seluruh unsur-unsur yang ada, termasuk komando dan pengendalian tempur dari masing-masing satuan). **Pertahanan keliling** (sektor-sektor utama dari semua gelar Alutsista satuan diatur secara keliling untuk saling menutup). **Kedalaman** (guna memberikan tembakan secara berlanjut pada sasaran yang menyerang, dengan tujuan untuk menghadapi segala macam serangan musuh). **Saling bantu** (terutama Satuan-Satuan tembak harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga diharapkan lebih dari satu satuan tembak yang kedudukannya saling berdekatan dapat menyerang secara bersamaan guna membantu menambah kepadatan tembakan), **Kekenyalan** (mampu menghadapi perubahan dinamika serangan dan dapat memberikan pendadakan terhadap musuh), **Penindakan Awal**



(mampu menyerang sasaran musuh sebelum musuh melepaskan bom/senjatanya).

Terkait hal ini, metode penggelaran yang perlu ditempuh adalah dengan metode/cara pengadaan, pemilihan, penggantian, maupun penambahan alutsista dengan perubahan dan pengaturan pada rancang bangun / desain alutsista sesuai kebutuhan jenis operasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan operasi, koneksitas antar alutsista ketiga matra, dan jenis-jenis ancaman yang akan dihadapi. Perubahan dan pengaturan rancang bangun / desain alutsista tentunya diharapkan dapat menghasilkan semacam *smart weapons/tools* guna menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi.

b. Pola Operasi. Dengan karakteristik Natuna sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan, maka wilayah perairan Natuna dalam konteks pertahanan militer harus menghadirkan konsep *Command of the sea*. Dalam teori sea power definisi terbatas *Command of the sea* dipahami penguasaan jalur laut.

Terkait dengan gelar pertahanan TNI di wilayah Natuna, maka menurut hemat penulis konsep *Command of the sea* untuk perairan Natuna harus mencakup gelar operasi TNI yang mengintegrasikan seluruh matra angkatan dan terlibat instansi/elemen maritime lainnya seperti Bakamla, BSSN dan BIN) dengan pola operasi gabungan TNI dan operasi gabungan terpadu secara sinergis dan interoperability

Menggunakan sarana yang berupa Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 – 2024 dimana dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kebijakan anggaran pertahanan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengelolaan pertahanan negara secara efektif dan efisien yang salah satunya mencakup pembangunan kekuatan pertahanan dan pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata sejalan dengan kemandirian industri pertahanan secara terencana dan terpadu, serta mengarahkan belanja pertahanan untuk penguatan sistem pertahanan yang berkelanjutan sesuai perkembangan



teknologi dengan mengutamakan penggunaan produk industri dalam negeri, dalam rangka mewujudkan sistem TNI yang berdaya tangkal tinggi dan memiliki efek deterrence guna menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI di Natuna.

c. Sinergitas dan interoperabilitas dengan kekuatan matra darat, matra laut, dan matra udara, serta kerjasama dengan kekuatan dari instansi lain dengan bertransformasi dan berorientasi pada NCW (*Network Centric Warfare*) yang menyatukan koordinasi dan kesamaan informasi antar matra, kecepatan serta keakuratan informasi yang diolah dari berbagai jenis sensor guna mempercepat pertukaran informasi yang akurat mengenai kondisi terkini hingga terwujudnya kecepatan komando (*speed of command*) dalam merespon setiap ancaman.

Hal ini dicapai melalui suatu sistem komando dan pengendalian yang terpusat, terintegrasi, terpadu, komprehensif dan real time, menggunakan sarana yang berupa keputusan politik pemerintah yang mengacu pada legislasi sebagai panduan dan perlindungan hukum atas digelarnya Operasi Gabungan TNI yang berlandaskan pada UUD 1945, UU No. 23/Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam rangka mengantisipasi meluasnya konflik Laut China Selatan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI

Untuk itu peran dari Lanud Ranai di Pulau Natuna, Lanud Roesmin Nurjadin di Pekanbaru, dan Lanud Supadio di Pontianak menjadi menarik untuk terus ditingkatkan sebagai *supporting power* untuk keberadaan pangkalan Angkatan Laut Ranai. Pentingnya kekuatan udara terlihat ketika Tiongkok mulai “bermain” di wilayah Natuna, di mana saat itu TNI AU mulai menempatkan pesawat tempurnya di Lanud Ranai. Memang Lanud Ranai belum memiliki landasan pacu ideal untuk satu skuadron pesawat tempur,



apalagi untuk pesawat Sukhoi SU-27 dan SU30, F-16 Fighting Falcon, serta pesawat KFX-IFX (sekarang disebut F-33) buatan Korea yang sudah dipesan dan akan menjadi bagian dari TNI AU.

Dalam teater strategis **Indonesia saat ini memiliki Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)**. Kawasan Natuna adalah area kerja Kogabwilhan I. Sebuah perang di wilayah perairan/kepulauan, ada perluasan kendali dari laut ke darat, kendali diupayakan sebagian dengan penghancuran, sebagian mungkin dengan melumpuhkan. Secara umum, kendali atas laut membebani lawan untuk bertindak bebas dalam operasinya. Sehingga bagi lawan, laut adalah penghalang, bukan sebagai komunikasi penghubung. Batasan-batasan yang mengikatnya, secara militer, ekonomi, politik, psikologis, tidak kalah nyata karena sifat lautan yang sulit dipahami. Setiap pasukan yang berada di Pulau Natuna merupakan perpanjangan dari kekuatan maritim negara ini. Setiap pangkalan udara yang tergelar di sepanjang kepulauan Natuna sebagai perpanjangan dari kendali negara di laut menuju pembentukan kendali atas musuh. Kasus konflik global, beberapa kampanye dapat dilakukan secara berurutan dan / atau secara bersamaan di teater perang tertentu. Kepemimpinan politik-militer tertinggi akan menugaskan kepada setiap komandan strategis teater pada satu tujuan strategis nasional. Komandan teater-strategis kemudian akan menerjemahkan tujuan itu menjadi beberapa tujuan teater-strategis dan mengambil tindakan dan tindakan yang tepat untuk mencapainya.

6. Kesimpulan

Permasalahan di Laut China Selatan merupakan konflik yang rumit. Hal yang mendasari kerumitan ini adalah ego sebuah negara yang karena kekuatannya, mengabaikan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh 160 negara di dunia.



Untuk mengantisipasi konflik di Laut China Selatan, dibutuhkan Pulau Natuna Besar sebagaimana kapal induk statis yang memiliki kemampuan *surveillance* yang mumpuni, kekuatan penyerang dan pelindung serta kekuatan pertahanan pantai strategis. Keberadaannya akan membuat Kekuatan *Defense* Indonesia di Natuna meningkat.

Untuk mencapai tujuan ini, gelar alutsista pertahanan militer di wilayah Kepulauan Natuna untuk lebih ditingkatkan melalui pengadaan, pemilihan, penggantian, maupun penambahan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan operasi, koneksitas antar alutsista ketiga matra, dan jenis-jenis ancaman yang akan dihadapi pada saat konflik kewilayahan di Natuna saat ini berubah menjadi Konflik Militer.

Daftar Pustaka

- Fatubun, A. (2015). Apa itu "Nautika Mile" dan "Knot"?. Berita satu news.com. diakses 14 Februari 2023
- Hasugian, (2017). Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut China Selatan. Tempo.com
- Irawan, S.A. (2022). Apa Itu Nine Dash Line yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?
- Kementerian Pertahanan. (2021). Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 487 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 (pp. 1–20).
- Kementerian Pertahanan (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia (Cetakan Ke). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Legionosuko, T., Pedrason, R., Sumarlan, S., Sudiby, & Halkis, M. (2021). *Reorientation of Indonesian Defense Diplomacy for Security Stability in the South China Sea*. Political Science and Security Studies Journal, 2(4), 3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5764901>
- Lykke Jr, A.F. (1989). Defining Military Strategy. Military Review, Vol. 77, No. 1, 8.
- Markas Besar TNI (2020). Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1059/XII/2020
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian



Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.

Marsetio. (2013). Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. *Citra Lekha*, 17(1), 1-18–18.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Rifa'i, A. (2019). Proses Pengambilan Keputusan. In *Researchgate* (pp. 1–12).

Sisriadi. (2016). Pengembangan Postur Pertahanan Militer guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Dunia. *Media Wira Kemhan*, 59(43), 1–92.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.